

GAGASAN DAN PRAKTIK POLITIK ISLAM ERA 1996-1990-AN DALAM PERSPEKTIF ORDE BARU

Imron Rosyadi

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura, Surakarta 57102
Telp. (0271) 717417, 719483 (Hunting) Faks. (0271) 715448



ABSTRAK

Kelahiran Orde Baru dengan aktor intelektualnya, yaitu Soeharto, sebenarnya menjadi harapan banyak kalangan, termasuk umat Islam, untuk dapat memberikan ruang yang luas, khususnya kehidupan politik yang demokratis, di samping mengembalikan kondisi ekonomi bangsa yang carut marut. Harapan yang besar itu terlihat dari dukungan umat Islam terhadap eksistensi Orde Baru. Namun, seiring perjalanan Orde Baru, harapan itu tidak seperti yang diharapkan. Sebaliknya, kehidupan politik yang tidak demokratis justru menjadi fenomena di mana-mana. Alasan yang dikemukakan adalah prioritas pembangunan ekonomi harus lebih didahulukan. Sebab, menurujuk pengalaman di masa Orde Lama, partai-partai memberikan andil dalam keterpurukan ekonomi bangsa, khususnya partisipasi yang ideologis dan kritis di Parlemen. Untuk itu, depolitisasi dan desimbolisasi terhadap partai Islam menjadi pilihan untuk dilakukan demi pembangunan ekonomi. Tulisan ini mencoba melakukan analisis secara cermat fenomena tersebut.

Kata Kunci: *politik Islam, Orde Baru*

Pendahuluan

Orde Baru pernah menjadi kekuatan yang mendominasi dalam pentas politik nasional selama 32 tahun. Orde

Baru merupakan orde pembeda dari orde lama era Soekarno. Secara embrional, kelahiran Orde Baru ini dapat dilacak dari Surat Perintah Sebelas Maret

(Supersemar) pada tahun 1966 yang dimotori oleh Jendral Soeharto. Kelahiran Orde Baru ini secara langsung memotong dua kekuatan utama pemerintahan Soekarno, yaitu Soekarno sendiri dan PKI. Dengan lengsernya dua kekuatan ini, maka tinggal ABRI sebagai kekuatan tunggal dalam Orde Baru di bawah komando sekaligus actor intelektualnya, yaitu Soeharto.¹

Soeharto dengan Orde Barunya mempunyai tugas untuk menata institusi-institusi politik dan memperbaiki perekonomian yang kondisinya carut-marut warisan Orde Lama.² Dalam bidang politik diperlukan format politik baru yang lebih demokratis dengan tidak mengulang format yang pernah dikembangkan Orde Lama. Keharusan perubahan ini merupakan suatu tuntutan yang berkembang pada waktu itu mengingat praktik politik Orde Lama yang lebih cenderung otoriter dan dictator.³ Sedangkan dalam bidang perekonomian, Orde Baru menantang dengan menitikberatkan pada orientasi pertumbuhan ekonomi. Untuk keperluan ini, Orde Baru dengan ABRI

sebagai kekuatan utama menggandeng teknokrat dan ekonom untuk mempercepat pemulihan perekonomian nasional.⁴

Untuk memperkuat pertumbuhan perekonomian secara stabil, Orde Baru harus belajar pengalaman kehidupan politik masa Orde Lama. Dalam evaluasinya, system liberal dalam menata kehidupan politik yang lebih berbasis pada partai di parlemen dipandang sangat tidak kondusif untuk pemulihan krisis yang dialami Negara. Bahkan pada tingkat tertentu, besarnya peran partai di parlemen itu dibarengi dengan kecenderungan adanya konflik politik di daerah yang berbasis ideologis dan berpotensi menimbulkan pemberontakan di daerah. Kondisi politik seperti itu, sulit mencapai consensus sehingga yang terjadi adalah berlarut-larutnya persoalan yang sedang dipecahkan khususnya perekonomian.

Bercermin pada kehidupan politik masa sebelumnya, Orde Baru mencoba menformat ulang system politik nasional. Dalam format baru ini, Orde Baru menyebutnya dengan system demokrasi Pancasila. Dalam konteks ini, Orde Baru

¹Eep Saifullah Fatah, *Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde Baru: Masalah dan Masa Depan Demokrasi Terpimpin Konstitusional* (Bandung: Rosyada, 2000), 22.

²Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1980), 47; Mohtar Mas'ud, *Struktur Ekonomi Politik Orde Baru* (Jakarta: LP3ES, 1989), 49-50.

³Format politik Orde Lama sangat sentralistik dan tidak demokratis karena itu, banyak kalangan berharap banyak kepada Orde Baru untuk tidak menggunakan format politik Orde Lama. Harapan ini didasarkan pada tiga argumentasi empiric, pertama, Orde Baru dilahirkan oleh gerakan massa yang mengalirkan arus keinginan dari bawah. Kedua, formulasi kebijakan-kebijakan politik tidak lagi didasarkan pada peran politisi dan ideologi. Ketiga, bergesernya pusat kekuasaan yang pada masa Orde Lama: Presiden, Militer dan dan PKI menjadi militer, teknokrat dan birokrasi. Namun, harapan itu, menurut Eep, hanya tinggal kenangan. Lihat Eep, *Pengkhianatan...*, 21-23.

⁴Ali Murtopo, *Strategi Politik Nasional* (Jakarta: CSIS, 1980), 47.

ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan. Dilihat dari sini, secara ideologis, antara Orde Lama dan Orde Baru tidak berbeda karena sama-sama ingin mempertahankan Pancasila dan UUD 45. Hal ini berbeda dengan Partai-partai Islam masa Orde Lama, seperti Masyumi, yang ingin memperjuangkan Islam sebagai dasar Negara.

Dalam demokrasi Pancasila versi Orde Baru, stabilitas politik menjadi sangat penting untuk dapat melindungi pertumbuhan ekonomi bangsa. Untuk itu, peran partai politik harus ditekan sedemikian rupa dan aspek-aspek politik ideologis selain Pancasila harus 'dimatikan' dalam kehidupan politik nasional. Untuk mengamankan idealisme ini, Orde Baru harus mengedepankan jurus represif dan pendekatan keamanan sebagai panglima untuk mempercepat laju program pembangunan nasional.

Tulisan ini akan mencoba menelusuri implementasi perspektif Orde Baru dalam kehidupan politik nasional, seperti disebutkan di muka, khususnya terhadap partai Islam.

Empat Strategi Politik Orde Baru.

Secara general, strategi untuk mencapai cita-cita Orde Baru untuk membangun Indonesia dilakukan dengan

empat pilar⁵ yang masing-masing merupakan hal berkait satu sama lain. **Pertama**, militer sebagai salah satu instrument kekuatan politik Orde Baru yang harus mendominasi berbagai aspek pembangunan. Penggunaan militer sebagai kekuatan utama pelaksanaan pembangunan merupakan cara logis yang ditempuh untuk mempercepat jalannya pembangunan. Opsi ini ditempuh dengan bercermin pada pengalaman Orde Lama, khususnya aspek keamanan yang tidak stabil.

Pada tingkat tertentu, sikap represif sebagai konsekuensi diterapkan pendekatan keamanan merupakan pilihan Orde Baru yang dilakukan dengan kesadaran mendalam. Tindakan represif ini ditujukan kepada siapa saja yang dinilai akan memunculkan potensi kearah instabilitas keamanan yang berujung pada mengganggu roda pemerintahan. Dari sini Orde baru berjalan tidak demokratis adalah suatu tindakan yang sulit dihindari, meski gagasan awal peralihan kekuasaan dari Orde Lama dimaksudkan untuk menciptakan iklim kehidupan yang demokratis.

Kedua, pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama pembangunan. Kondisi ekonomi yang carut marut menjadi perhatian utama Orde Baru. Pemerintah secara terus menerus mengupayakan percepatan pertumbuhan ekonomi

⁵Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 198-212.

yang pada tingkat tertentu mengesampingkan pemerataan.⁶ Untuk keperluan ini, Orde Baru merekrut teknokrat-ekonom dan menarik investor asing untuk masuk ke Indonesia dengan keistimewaan-keistimewaan. Investor asing yang menjadi incaran Orde Baru waktu itu adalah Amerika dan Jepang. Sedangkan pengusaha local diberikan fasilitas khusus sebagai pendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi. Pengusaha local yang paling diuntungkan dengan kebijakan ini adalah pengusaha nonpribumi oleh karena merekalah yang mempunyai modal yang diperolehnya semasa penjajahan Belanda yang waktu itu diberikan hak istimewa untuk mengembangkan perdagangan.⁷

Untuk mengawasi pembangunan ekonomi ini, Orde Baru membentuk Dewan Stabilitas Ekonomi di bawah Soeharto sebagai ketuanya dengan anggota stafnya dari ekonom Universitas Indonesia.⁸ Di antara mereka itu, misalnya Ali Wardana, Wijoyo Nitisastro, Muhammad Sjadli, Emil Salim, dan Subroto. Di samping itu, Soeharto selaku Presiden, mengangkat tim penasihat ekonomi Presiden dengan anggota

Sumitro Djoyohadikusumo, Radius Prawiro dan Frans Seda. Tim ini merupakan generasi pertama dan masih ditambah dengan tim generasi kedua, misalnya, Arifin Siregar dan Andrianus Mooy.⁹

Program pertumbuhan ekonomi Orde Baru ini memang menuai hasil memperbaiki kondisi ekonomi yang ditinggalkan Orde Lama. Namun seiring dengan pertumbuhan itu, muncul kritik dari sejumlah cendekiawan karena cara-cara untuk menuju ke sana dilakukan dengan berlebihan yang berakibat munculnya kesenjangan yang tajam di tengah masyarakat, bahkan ekonomi pertumbuhan ini bergulir dan hanya dimiliki oleh sekelompok tertentu saja. Dalam hal ini, warga Negara Indonesi keturunan cina mendominasi penikmat ekonomi pertumbuhan. Dari pengusaha pribumi kebanyakan yang dekat dengan pejabat atau mantan pejabat tinggi. Menurut penelitian Yoon Hwan Shin, pada akhir tahun 1980-an, terdapat 29 konglomerat nonpri dari 40 konglomerat terbesar di Indonesia dengan perincian peringkat 1-8 ditempati pengusaha WNI keturunan, baru diikuti oleh pengusaha pribumi. Dari

⁶Analisis tentang program ekonomi dan implikasinya dalam kehidupan social dan politik, lihat dalam H.W. Arndt (ed), *Pembangunan dan Pemerataan: Indonesia di Masa Orde Baru* (Jakarta: LP3ES, 1988); juga Arief Budiman, *Negara dan Pembangunan, Studi tentang Indonesia dan Korea* (Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas, 1999).

⁷Syahrir menjelaskan secara panjang lebar tentang transformasi ekonomi ini dalam bukunya, *Refleksi Pembangunan Ekonomi 1968-1992* (Jakarta: Gramedia, 1992).

⁸Mereka ini sering disebut dengan Mafia Berkeley karena mereka ini kebanyakan semasa memperoleh gelar akademik tertingginya, yaitu PhD dari universitas Berkeley USA.

⁹Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 201.

20 peringkat teratas, hanya terdapat enam pengusaha pribumi dan empat orang di antaranya memiliki hubungan kekeluargaan dengan pejabat atau mantan pejabat tinggi Negara.¹⁰

Ketiga, penciptaan stabilitas politik. Stabilitas ini merupakan prasyarat utama yang harus diciptakan untuk dapat terlaksana pencapaian prioritas pembangunan ekonomi. Untuk keperluan ini, kegagalan Orde Lama membangun ekonomi harus menjadi catatan penting. Pada waktu itu, sulitnya mencapai konsesus politik karena konflik politik sangat mewarnai perpolitikan nasional. Akar dari problem ini adalah ruang gerak yang terlalu bebas di parlemen sebagai tempat memproduksi konsesus. Partai-partai yang ada di parlemen banyak diwarnai oleh perdebatan politik yang berbasis ideologis sehingga sulit dicapai konsesus.¹¹

Berkaitan dengan akar-akar ketidakstabilan politik semasa Orde Lama, maka Orde baru melakukan evaluasi yang endingnya untuk terciptanya stabilitas politik, yaitu (1) menciptakan tertib politik yang bebas dari konflik ideologis-politik. Implementasi dari program ini

adalah penyederhanaan parpol melalui fusi partai-partai yang ada, sistem politik berdasarkan musyawarah mufakat, penerapan asas tunggal Pancasila. (2) membatasi partisipasi politik yang pluralistic. Partisipasi politik harus diarahkan pada program bukan pada hal-hal yang bersifat ideologis. Untuk mengurangi tingkat ideologis, maka ideology partai harus disatukan, yaitu Pancasila.¹²

Keempat, terbentuknya *hegemony party system*.¹³ Maksud dari pembentukan ini adalah untuk dapat memperoleh dukungan parlemen sebagai kepanjangan massa dalam menjalankan program-program pembangunan. Justifikasi ini diperlukan karena militer sebagai pilar utama Orde Baru memerlukan massa, dan partai politik merupakan jalur yang pas sebagai penghubung antara pemerintah dan massa sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik. Tetapi untuk menghindari fenomena seperti yang terjadi pada masa lalu, pemerintah harus memiliki partai yang duduk di parlemen secara dominant sehingga konflik-konflik politik dapat dieliminir seminimal mungkin. Dengan dominasi anggota parlemen sebagai

¹⁰Yoon Hwan Shin, *Demysifying the Capitaist State: Political Patron-age, Bureaucrais Interest and Capitalis-un Formation in Soeharto's Indonesia*, seperti dikutip oleh Abd Aziz Thaba, *Islam dan Negara*. 202.

¹¹Penjelasan yang agak lengkap dan analisis yang tajam tentang sistem politik Indonesia, bisa dibaca dalam Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1981).

¹²Mochtar Mas'oe'd, *Ekonomi dan Struktur Politik* (Jakarta: LP3ES, 1989) 149.

¹³Tentang asal usul *hegemony party system* dan dampaknya bagi kehidupan politik, lihat Affan Ghafar, *Javanese Voters, a Case Study of Election Under Hegemonic Party System* (Yogyakarta: UGM Press, 1992).

partainya pemerintah maka program-program pemerintah akan lebih mudah disetujui dan sedikit catatan pengawasan dari parlemen.¹⁴

Hegemony party system tersebut adalah Golkar. Untuk memperkuat dominasi anggota parlemen, di samping melalui Golkar hasil pemilu, juga ada anggota parlemen yang diangkat pemerintah tanpa melalui perolehan suara pemilu yang diambilkan dari YNI dan utusan golongan. Anggota parlemen dari jalur non pemilu ini semuanya merupakan anggota yang sepaham dengan pemerintah. Karena itu posisi pemerintah di parlemen sangat kuat dan semua itu dikendalikan oleh presiden.

Sejak pemilu pada masa Orde Baru dilaksanakan, yaitu pada sejak tahun 1971 sampai tahun 1997, Golkar selalu menjadi pemenangnya, sedangkan PPP dan PDI hanya memperoleh suara yang tidak signifikan, bahkan Golkar melalui perolehan suara selalu menempatkan Golkar sebagai mayoritas tunggal. Dari system ini, menurut Noer, mencerminkan system kepartaian yang disebut dengan system kepartaian setengah partai.¹⁵ Dengan demikian, ditambah dengan pengangkatan TNI dan utusan golongan, maka sebagian besar anggota

parlemen adalah orangnya pemerintah. Sistem rekrutmen model Orde Baru ini banyak mendapatkan kritik karena system seperti ini melahirkan system yang hegemonic.¹⁶

Depolitisasi Partai Islam

Soeharto sebagai actor intelektual Orde Baru, seperti dikatakan oleh Bryan May, setelah dilantik menjadi presiden hasil pemilu 1971, membuat enam program, yaitu *pertama*, tidak ada ideology partai selain Pancasila. *Kedua*, partai harus diarahkan kepada program bukan pada pengembangan ideologis. Ketiga, jumlah partai harus dikurangi. Keempat, orang-orang desa harus lebih diarahkan pada partisipasi dalam pembangunan, bukan pada partisipasi politik. Kelima, organisasi massa harus dijauhkan dari partai politik. Keenam, pegawai pemerintah dikeluarkan dari partai politik dan harus taat (loyalitas) hanya kepada pemerintah.¹⁷

Bila dicermati dengan baik, nampak dengan jelas bahwa Orde Baru bermaksud melakukan depolitisasi partai-partai, tidak terkecuali partai Islam. Depolitisasi ini harus dilakukan Orde Baru merujuk pada pengalaman pemerintahan sebelumnya yang merasa

¹⁴Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara*, 212-213.

¹⁵Deliar Noer, *Politik dan Pembangunan* (Jakarta: Yayasan pengkhidmatan, 1983), 73.

¹⁶Affan Ghafar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 269.

¹⁷Dikutip dari M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik* (Yogyakarta: Tiarawacana, 1999), 73.

kesulitan dalam menjalankan program-programnya disebabkan kuatnya partai-partai di parlemen, termasuk partai Islam, semisal Masyumi. Oleh karena itu, depolitisasi merupakan sebuah keharusan untuk dilakukan dalam rangka memperlancar tercapainya pertumbuhan ekonomi.

Seperti disebutkan di atas, bahwa termasuk partai yang wajib didepolitisasi adalah partai Islam. Pengalaman penampilan partai Islam sebelumnya dalam partisipasinya di parlemen, Orde Baru berkesimpulan bahwa partai Islam harus dilemahkan. Asumsi dari proyek ini adalah bahwa Islam yang kuat akan menjadi hambatan bagi modernisasi yang dicanangkan Orde Baru. Melihat asumsi ini, agaknya ada kesebangunan antara Orde Baru dan politik Islam Hindia Belanda dalam melihat posisi partai Islam. Tanpanya, asumsi ini mengandung unsure logika bahwa dengan mendepolitisasi partai Islam, Orde Baru akan dapat mempertahankan kekuasaannya serta melindungi kepentingan-kepentingannya.¹⁸ Penolakan rehabilitasi partai Masyumi yang diajukan oleh sejumlah tokohnya merupakan bagian dari implementasi agenda politik Orde Baru yang didasarkan pada asumsi di atas yang bisa jadi tidak semata dalam

kerangka depolitisasi partai tetapi juga kekhawatiran atas Islam yang kuat secara politik akan menjadi kendala tersendiri dalam melaksanakan agenda pembangunan dan kepentingan tertentu.¹⁹

Pengalaman dari pergumulan Masyumi sebagai partai selama Orde Lama yang dinamis, ideologis dan kritis terhadap jalannya pemerintahan menjadi catatan penting sehingga Orde Baru akan selalu melakukan penjinakan idealisme dan aktivisme politik Islam.²⁰ Dari sini, di samping Masyumi mempunyai kekuatan dan potensi besar yang bisa menggoyahkan sendi-sendi agenda besar Orde Baru yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara sehingga kehadiran Masyumi mempunyai potensi besarmunculnya konflik ideologis yang tidak pernah berakhir. Dalam perspektif kerangka ini, tidak hanya partai Masyumi saja yang ditolak tetapi juga partai lain yang mempunyai potensi yang sama, yaitu partai yang mengedepankan konflik ideologis selain Pancasila akan mengalami nasib yang sama pula.

Pengawasan atas kehidupan politik dalam kerangka kelangsungan agenda pembangunan seperti dijelaskan di atas, pada dataran operasional, tercermin dalam pendekatan keamanan dan bersifat monolitik yang diterapkan Orde

¹⁸M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru* (Jakarta: Logos, 2000), 63.

¹⁹Mencermati salah satu arsitek Orde Baru dalam bidang politik, dalam hal ini Ali Murtopo, nampak ada unsure ideologis Kristen dalam membuat kebijakan depolitisasi ini. Lihat Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 75-81.

²⁰Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), 111.

Baru. Penerapan seperti ini memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik warga negara oleh karena kesulitan mencari celah dalam politik untuk mengembangkan diri. Dalam jangka waktu yang lama, warga negara akan lebih memilih tidak bicara politik dan mencari bidang lain yang tidak banyak berhubungan dengan politik karena risikonya besar, yaitu berhadapan dengan keamanan. Dengan cara memilih aman ini, maka pemenuhan diri, khususnya materi dengan tidak melalui jalur politik yang berseberangan dengan pemerintah lebih bisa terpenuhi seperti yang diinginkan.

Pada dataran yang paling bawah, khususnya di pedesaan, warga harus dibebaskan dari jangkauan partai politik sebagai tempat untuk melakukan ekspresi politik warga negara di pedesaan sehingga problem politik yang dialaminya tidak banyak yang terartikulasi ke permukaan. Dengan demikian, kepentingan-kepentingan politik rakyat tidak memperoleh ruang untuk dikemukakan ke permukaan, khususnya melalui partai politik. Kebijakan seperti ini disebut dengan politik masa mengambang. Pada saat bersamaan, pemerintah menganjurkan rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan seperti yang diprogramkan pemerintah. Dari sini nampak bahwa pemerintah Orde Baru harus

memonopoli politik.²¹

Untuk dapat mengontrol agenda politik di atas, politik harus dikendalikan dalam satu komando untuk seluruh unsur-unsur kekuatan pelaksana negara. Dalam hal ini, presiden berada dalam struktur puncak birokrasi dengan mengomando militer sebagai unsur penting untuk mendorong jalannya birokrasi yang akan melaksanakan kekuasaan atas masyarakat. Dengan pola seperti ini, presiden sebagai kepala eksekutif tidak akan diganggu oleh legislatif karena lembaga ini didominasi oleh Golkar yang mempunyai anggota mayoritas juga di bawah komando presiden sendiri sehingga DPR akan selalu menjadi stempel tiap keinginan pemerintah yang dalam istilah Liddle disebut dengan piradima Orde Baru.²²

Depolitisasi partai, termasuk partai Islam, sebetulnya merupakan bagian dari proyek yang lebih besar, yakni depolitisasi rakyat. Hal ini tampak pada upaya penerapan kebijakan masa mengambang. Maksud dari kebijakan ini adalah mengurangi kesadaran politik rakyat lapisan akar rumput dan mengasingkan pemimpin politik dari pendukungnya. Dengan demikian, problem problem di akar rumput tidak dijadikan komoditi politik bagi partai untuk mengekspresikan ke permukaan. Untuk mendukung kebijakan ini, media massa

²¹M. Rusli Karim, *Negara*, 58-68.

²²R. William Liddle, "Soeharto's Indonesia: Personal Rule and Political Institution", dalam *Pacific Affair*, no 68 tahun 1995, seperti dikutip M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik*, 65-66.

sebagai saluran yang mempunyai jangkauan yang luas harus dikontrol sedemikian rupa.²³

Desimbolisasi Islam.

Desimbolisasi Islam harus dilakukan oleh Orde Baru, khususnya simbol-simbol pada partai Islam. Arti penting desimbolisasi ini dimaksudkan untuk mengurangi munculnya radikalisasi partai Islam dalam merespon kebijakan-kebijakan pemerintah. Meskipun Masyumi tidak lagi hidup sebagai partai, namun itu tidak berarti bahwa simbol-simbol Islam pada tidak ada. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai alat perjuangan politik Islam yang masih hidup di masa Orde Baru masih dirasa sangat kental dengan simbol-simbol Islam. Contoh dari kebijakan ini adalah keharusan penggantian lambang ka'bah yang menjadi identitas sebagai partai Islam menjadi lambang bintang. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, asas Islam harus ditanggalkan PPP dan dirubah menjadi Pancasila seperti dikehendaki dalam undang-undang nomor 5 tahun 1985 dan undang-undang nomor 8 tahun 1985.

Upaya desimbolisasi tersebut di atas nampak bahwa Orde Baru melihat

ajaran Islam yang mewujudkan dalam bentuk Islam politik sebagai kendala yang dalam kerangka agenda Orde Baru menjadi duri pemerintahannya. Cara pandang seperti ini mengingatkan kategorisasi Snouck Hurgronje pada saat ia menjadi penasehat Hindia Belanda di Indonesia. Pada waktu itu, Snouck menganggap bahwa Islam politik itu mempunyai potensi yang cukup signifikan dalam memberikan dorongan dalam bentuk perlawanan terhadap penguasa (Hindia Belanda), karena itu, segala simbol yang memberikan wadah bagi ekspresi Islam politik harus dihilangkan.²⁴

Meskipun demikian, PPP sebagai partai Islam tetap menunjukkan sikap kritis terhadap beberapa kebijakan pemerintah. Dari sini tampaknya apa yang dipersepsikan pemerintah Orde Baru melalui desimbolisasi Islam pada PPP tidak sepenuhnya berhasil. Dalam beberapa hal, memang PPP terkooptasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, tetapi dalam beberapa hal yang lain, PPP sebagai satu-satunya forum untuk mengartikulasikan politik Islam melakukan kritik terhadap gagasan pemerintah bahkan tanpa kompromi karena menurut PPP sudah menyangkut dataran yang tidak bisa ditolerir.²⁵

²³M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik*, 67.

²⁴Lihat, Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES), 1985.

²⁵Gagasan-gagasan pemerintah yang dikritisi PPP, misalnya, Rancangan Undang-undang Perkawinan, Aliran Perkawinan, perjudian, penyalahgunaan jabatan dan sebagainya. Pada titik ini, hubungan PPP dengan pemerintah, oleh Abdul Aziz Thaba disebut dengan hubungan antagonis. Lihat, Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara*, 252-262.

Perlawanan-perlawanan seperti di atas nampak dengan jelas terinspirasi dari ajaran Islam. Fenomena ini tidak boleh terus berlangsung hidup dalam pemerintahan Orde Baru. Melihat perlawanan yang bernuansa ideologis ini, pemerintah bersikap represif terhadap Islam tidak hanya pada partai Islam tetapi juga gerakan-gerakan keagamaan lainnya yang bernafaskan Islam. Bahkan pada pidato Soeharto di depan Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidang Pleno tanggal 16 Agustus 1982 merencanakan untuk mewajibkan seluruh parpol dan ormas menanggalkan asasnya menjadi satu asas, yaitu asas Pancasila. Dari pidato ini nampak bahwa dalam pandangan Soeharto, PPP dipandang memasukkan ideologis Islam salah satu unsur dalam struktur kehidupan politik nasional.²⁶

Liddle, Indonesianis asal Amerika Serikat, mencatat bahwa pertentangan antara PPP dan pemerintah merupakan cermin dari pergumulan antara Islam dan pemerintah. Fakta ini menjadikan Islam waktu itu menjadi sasaran sebagai agama yang menghambat pembangunan, sehingga seiring dengan itu, gerak Islam selalu dibatasi dan diawasi oleh pemerintah.

Periode ini oleh banyak kalangan disebut masa ketegangan antara Islam dan pemerintah. Ketegangan ini pada titik tertentu memang merugikan Islam itu sendiri, karena itu, banyak cendekiawan memberikan respon untuk dapat ke luar dari kemelut ketegangan tersebut.²⁷

Umat Islam sendiri terbelah ke dalam dua kutub dalam melihat sikap represif pemerintah waktu itu. Kutub pertama tetap bersikap kritis terhadap pemerintah meskipun mendapat perlakuan represif. Kutub ini kebanyakan dilakukan oleh politisi Muslim. Kutub ini biasanya disebut dengan perjuangan Islam politik. Sedangkan kutub lainnya bersikap akomodatif dengan mengkaji ulang strategi perjuangan Islam yang tidak melalui partai Islam karena itu partai dinilai tidak termasuk kelompok strategis. Perjuangan ini biasanya disebut dengan perjuangan Islam kultural. Kutub ini kebanyakan disuarakan oleh intelektual yang berpendidikan barat.²⁸

Simpulan

Dari uraian-uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa Orde Baru lahir sebagai antitesis terhadap Orde Lama. Tugas utama Orde Baru adalah menata

²⁶Lihat, Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 1982.

²⁷Wacana ketegangan ini dianalisis oleh faisal Ismail secara cermat dalam bukunya, *Ideologi Hegemonik dan Otoritas Agama* (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999).

²⁸Respon cendekiawan ini dianalisis secara tajam oleh M. Syafi' I Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1995); Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998).

ekonomi bangsa yang carut-marut. Untuk memperkuat program ini, Orde Baru harus melakukan restrukturisasi institusi politik yang kondusif. Dua hal ini harus selalu terkait satu dengan lainnya. Dalam bidang ekonomi, pemerintah Orde Baru memprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan program ini, Orde Baru membuat penyangga utama pada teknokrat-ekonom dan menggiatkan investasi asing.

Dalam bidang politik, Orde Baru melakukan penataan ulang atas institusi-institusi politik, termasuk partai Islam. Kehidupan politik, termasuk partai, harus menjadi bagian dari program pertumbuhan ekonomi, bukan sebaliknya, ia menjadi hambatan. Karena itu, dalam penataan politik ini, Orde Baru telah bercermin pada Orde Lama. Kehidupan politik, termasuk eksistensi partai, yang

berujung pada konflik ideologis dan kritis terhadap pemerintah harus dihindari.

Partai-partai Islam, menurut Orde Baru, harus difusikan menjadi satu partai sehingga mudah dikendalikan. Di samping itu, simbol-simbol keislaman di dalamnya yang dikhawatirkan mencerminkan kuatnya Islam politik harus dihilangkan. Hal ini diasumsikan bahwa Islam politik itu dapat berujung pada pengembangan ideologis. Untuk mengurangi konflik ideologis ini, asas partai harus dirubah menjadi asas Pancasila. Berdasarkan pengalaman Orde Lama, partai-partai Islam menunjukkan sikap kritis terhadap pemerintah yang ini dapat menyulitkan pemerintah dalam melaksanakan program-program untuk membangun masyarakat. Dengan kata lain, Orde Baru melakukan depolitisasi dan desimbolisasi Islam pada partai-partai Islam. Wallahu A'lam

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 201.
- Affan Ghafar, *Javanese Voters, a Case Study of Election Under Hegemonic Party System* (Yogyakarta: UGM Press, 1992).
- Affan Ghafar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Ali Murtopo, *Strategi Politik Nasional* (Jakarta: CSIS, 1980).

- Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985).
- Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1981).
- Arief Budiman, *Negara dan Pembangunan, Studi tentang Indonesia dan Korea* (Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas, 1999).
- Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Tranformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998).
- Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Tranformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998).
- Deliar Noer, *Politik dan Pembangunan* (Jakarta: Yayasan pengkhidmatan, 1983).
- Eep Saifullah Fatah, *Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde Baru: Masalah dan Masa Depan Demokrasi Terpimpin Konstitusional* (Bandung: Rosyada, 2000).
- Faisal Ismail, *Ideologi Hegemonic dan Otoritas Agama* (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999).
- H.W. Arnandt (ed), *Pembangunan dan Pemerataan: Indonesia di Masa Orde Baru* (Jakarta: LP3ES, 1988).
- Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1980).
- M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru* (Jakarta: Logos, 2000).
- M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik* (Yogyakarta: Tiarawacana, 1999).
- M. Syafi' I Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1995).
- Mochtar Mas' oed, *Ekonomi dan Struktur Politik* (Jakarta: LP3ES, 1989).
- Mohtar Mas' ud, *Struktur Ekonomi Politik Orde Baru* (Jakarta: LP3ES, 1989).
- Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 1982.
- R. William Liddle, "Soeharto`s Indonesia: Personal Rule and Political Institustuion", dalam *Pacific Affair*, no 68 tahun 1995
- Syahrir, *Refleksi Pembangunan Ekonomi 1968-1992* (Jakarta: Gramedia, 1992).